**NASKAH PUBLIKASI**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

( Studi Kasus : Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)



*Oleh :*

*Geri Indra Wati*

*16061015*

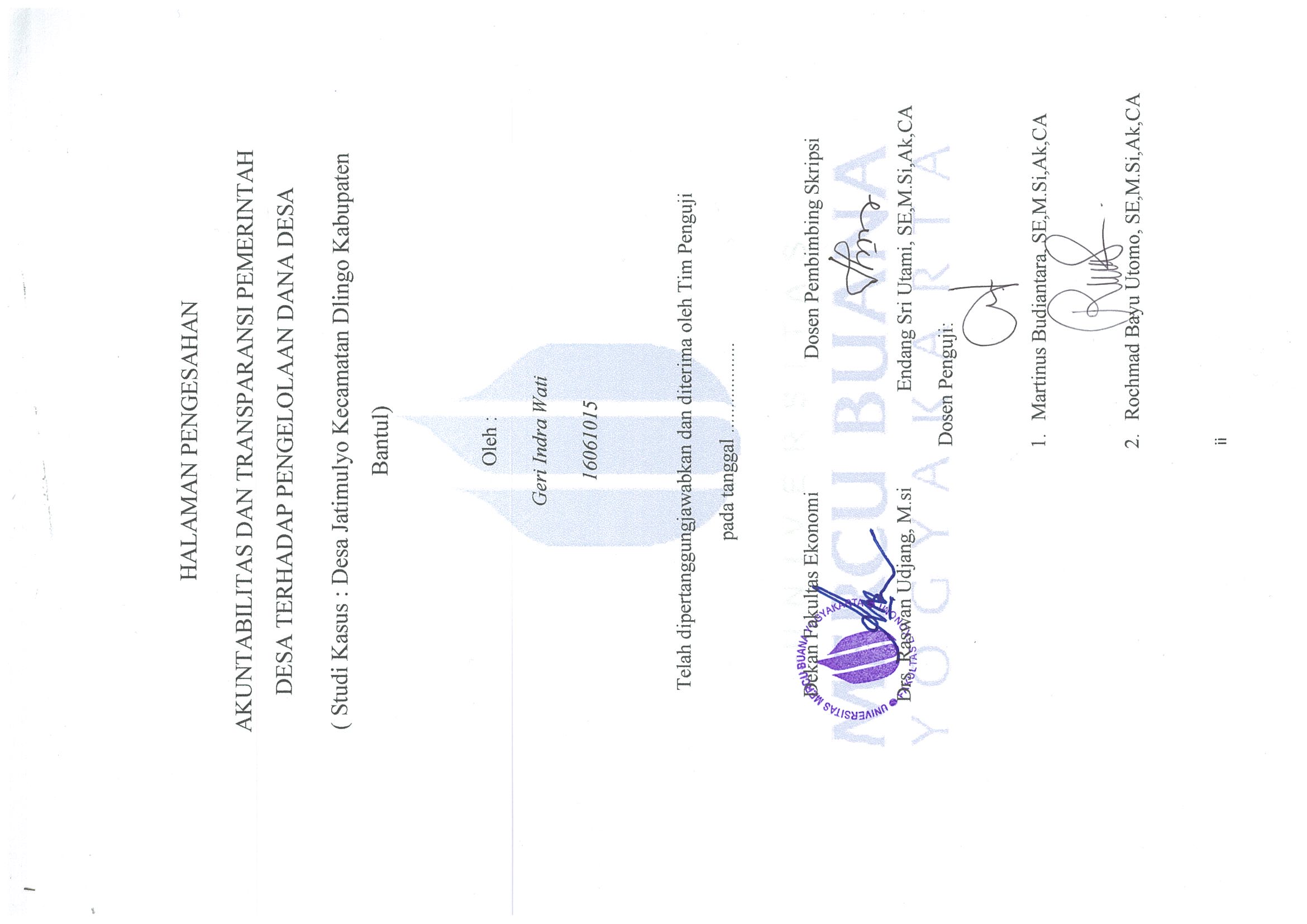
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

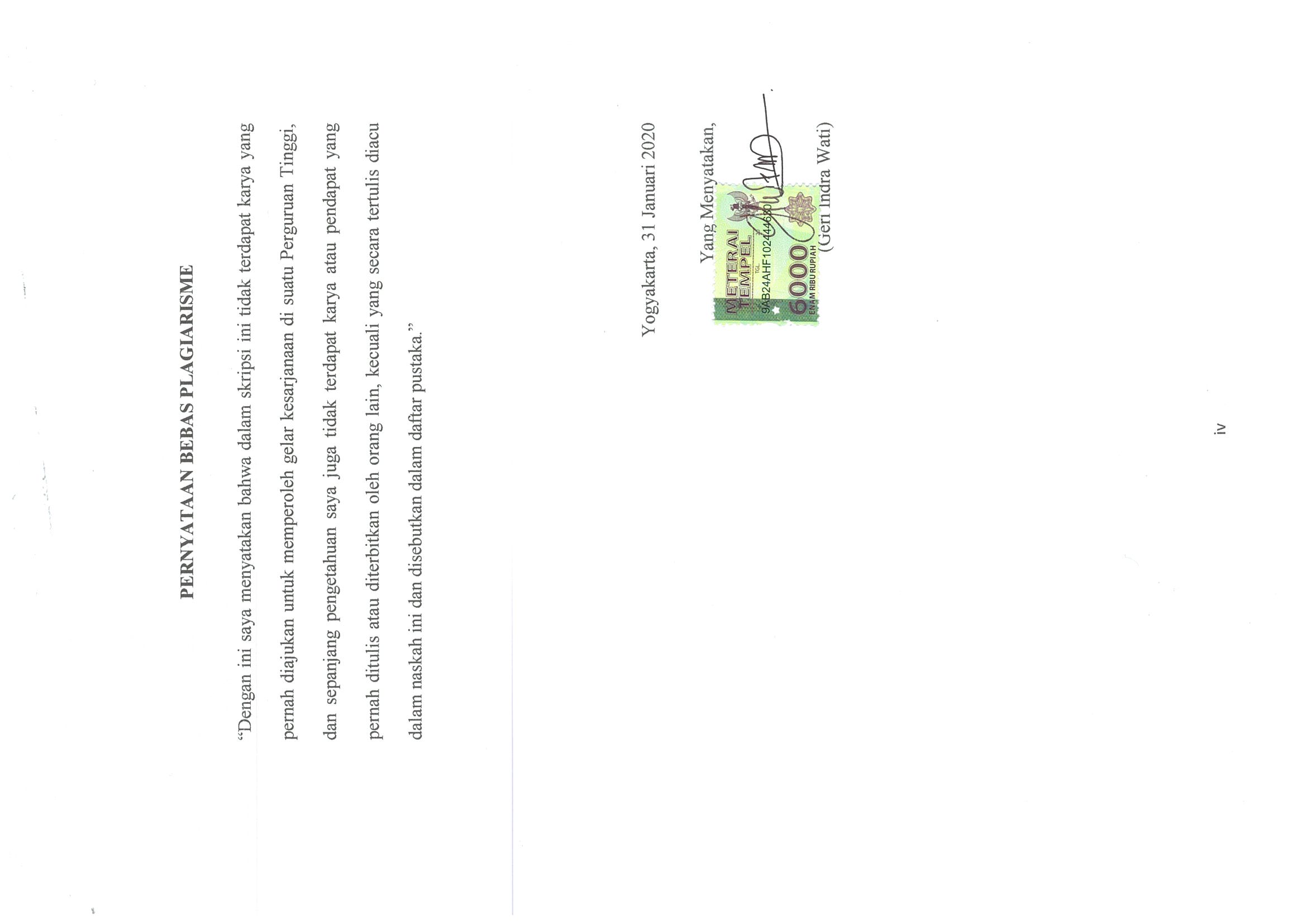
**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2019**





**ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Jatimulyo terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Jatimulyo, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbabis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggarakan pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Jatimulyo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatimulyo menggunakan media informasi digital, terdapat pertemuan yang dilakukan guna membahas pengelolaan dana desa, selain itu juga terdapat papan baliho yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi perlu adanya peningkatan sikap kritis masyarakat terhadap pembangunan desa terutama pengelolaan dana desa.

**Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah desa**

*ABSTRACT*

*Accountability is a responsibility of the government to report and present activities that have been carried out to the public. The accountability is carried out so that the government can be transparent with the commitments that have been formed in its implementation. This study aims to assess the accountability and transparency of the Jatimulyo village government towards the management of the Village Fund in Panggungharjo village, Sewon sub-district, Bantul district. This study uses qualitative methods after field studies. Data collection techniques used in the form of interviews with semi-structured techniques. Interviews were conducted with the village government who carried out the administration and the Village Consultative Body (BPD) as representatives of the community, totaling 9 informants. The results of this study indicate that the Village Fund financial management implemented by the village government of Panggungharjo is in accordance with the laws and regulations. Transparency is carried out by the village government of Panggungharjo using digital information media, there is information distributed by each hamlet through the RT head and the Hamlet Chair, besides that there is also an information board placed at the Village Office. Even though the management of the Village Fund carried out by the village government is very good, the community's understanding of the Village Fund policy is still low.*

*Keywords: Village Funds, Accountability, Transparency, Village Government*

**PENDAHULUAN**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Penilitan yang dilakukan oleh Ash-shidiqq dan Hindrawan Wibisono (2018) mengidentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up,* laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada:

1. Proses perencanaan;

2. Proses pertanggungjawaban;

3. Proses monitoring dan evaluasi;

4. Proses pelaksanaan; dan

5. Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain:

1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.

2. Mempertanggungjawabkan pembiayaaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.

3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.

4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.

6. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.

7. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.

8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.

11. Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.

12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan akuntabel. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Damayanti, 2018). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kecamatan Dlingo yang terletak di Kabupaten Bantul memiliki enam desa, salah satunya adalah Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo adalah salah satu desa di kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupateng Gunung Kidul. Akses menuju Desa Jatimulyo juga sudah memadai dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Selain daerah yang strategis, Desa Jatimulyo juga memiliki beragam potensi, salah satunya adalah usaha pembuatan mebel yang tersebar di seluruh dusun di Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo juga mendapatkan penghargaan dalam pemberdayaan desa. Selain itu, Desa Jatimulyo memiliki potensi lain berupa aparat desa yang cukup aktif membantu masyarakatnya dalam berbagai kegiatan. Aparat Desa Jatimulyo juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa seperti musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat mengenai pemberian penuh kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

**METODE**

**Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data,penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah pemerintah desa Jatimulyo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu Riset Kepustakaan, dokumen dari Pemerintahan Desa Jatimulyo yang berkaitan Dengan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018, serta peraturan perumdang-undangan mengenai Pengelolaan dana desa yang berlaku.

**Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan secara langsung, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam hal-hal yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara tersebut untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya.

**Informan Penelitian**

Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa ,Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), Masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa.

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

**Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Wilayah Penelitian**

Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, DIY. Terletak kurang lebih 15 km kearah timur laut dari Kecamatan Dlingo Desa Jatimulyo mempunyai luas wilayah 891,0305 ha dengan jumlah penduduk 6.817, jumlah kepala keluarga 2.040 dengan 10 Dusun/Padukuhan.

**Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Jatimulyo**

Setiap Kepala Desa memiliki visi dan misi dalam membangun desa. Visi dan misi tersebut selanjutmya dituangkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes harus ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) bersama sama dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya paling lama 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik. Setelah RPJMDes dibentuk, barulah Pemerintah Desa membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPD dibentuk berdasarkan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa. RKPD tersebut juga dilampirkan dengan rancangan anggaran biaya dan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pembentukan RKPD dan RAB dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setiap dusun akan memamparkan kegiatan yang ingin direalisasikan beserta dengan anggarannya. Setelah itu barulah BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam musyawarah desa akan dipaparkan mengenai rencana kegiatan dari masing-masing dusun. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Didalam musyawarah desa juga dipaparkan mengenai RKPD. Setelah musyawarah desa dilakukan, maka selanjutnya diadakan Musrenbang yang diadakan oleh aparatur desa. Dalam Musrenbang ditetapkan mengenai RKPD dan RAB yang selanjutnya ditetapkan menjadi RAPBDesa.

Setelah ditetapkan RAPBDesa, maka pemerintah desa akan memberikan RAPBDesa tersebut kepada kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan penetapan RAPBDesa tersebut. Ketika RAPBDesa sudah dievaluasi kecamatan dan sudah dibenahi oleh pihak desa, maka RAPBDesa berubah menjadi APBDesa. APBDesa selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Kegiatan dapat dilaksanakan ketika dana yang telah dianggarkan didalam APBDesa dan RAB cair. Dana-dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dana desa sendiri cair secara bertahap, ada dua tahap pencairan dana desa yaitu awal tahun dan pertengahan tahun. Dana tersebut hanya bisa cair saat laporan pertanggungjawaban tahapan sebelumnya sudah diselesaikan. Dana desa hanya diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat dan untuk peralatan kantor desa lainnya seperti Alat Tulis Kantor. Ketika dana desa diberikan kepada desa terbelakang, maka peruntukannya untuk membangun fasilitas pokok seperti penyedia air minum, saluran irigasi, talut dan yang lainnya. Ketika dana desa diberikan kepada desa yang berkembang, maka keperuntukkannya untuk pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan.jika dana desa diberikan kepada desa yang maju maka peruntukannya dibolehkan untuk membangun tempat wisata komersial. Belanja desa yang diperoleh dari anggaran tersebut 70% untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sementara 30% sisanya untuk penghasilan tetap atau operasional pemerintahan desa.

Setiap kegiatan memiliki RABnya masing-masing. RAB tersebut dijadikan pedoman bagi tim pelaksana kegiatan untuk melakukan pengadaan barang. Setelah dana cair dan kegiatan sudah dilaksanakan, tim pelaksana harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Laporan tersebut nantinya akan digabungkan dengan laporan lainnya menjadi Laporan Pertanggungajawaban (LPJ). Laporan tersebut akan dibahas bersama BPD. Setelah laporan Pertanggungjawaban disepakati, maka akan diberikan kepada kecamatan.

Dana yang diterima bendahara selanjutnya akan di proses dan dipilah untuk melakukan pembangunan yang ditanggungjawabi oleh Kepala Desa. Dana desa terebut turun setiap tahun sebanyak dua kali. Setelah bendahara selesai memproses, kegiatan pembangunan akan segera dilakukan agar masyarakat tidak menunggu lama. Setelah pembangunan selesai, bagian pembangunan membuat laporan pertanggungjawaban atas proyek atau kegiatan yang telah dilakukan, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, laporan pertanggungjawaban yang sudah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada sekretaris untuk diteliti kembali. Laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada pihak kecamatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna memberi bukti bahwa kegiatan sudah dilakukan dan telah selesai.

**Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana desa yang telah diterima diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar serta memperluas kesempatan kerja.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas secara tertib. Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara desa selalu melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran kas di Desa Jatimulyo. Hal tersebut dilakukan agar setiap transasksi dan kegiatan dapat dijabarkan secara rinci kepada pihak yang membutuhkan. Pemerintah desa Jatimulyo berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, untuk keseluruhan, Desa Jatimulyo sudah menggunakan user dalam pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas. Sehingga dalam pengelolaan dana desa kewenangan bendahara hanya membuat SPD, pengambilan dana desa yang cair kemudian membagikan kepada Pelaksana Kegiatan masing-masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa meliputi pencatatan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Berdasarkan hasil wawancara, dalam penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Jatmulyo sudah menggunakan user sehingga pembukuan sudah berbentuk sistem. Pembukuan dalam bentuk fisik sudah tidak dilakukan lagi. Sehingga rincian transaksi dan kontrol transaksi dapat dilakukan melalui user.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa Kepala Desa harus menyampaikan realisasi pelaksanaan kepada bupati/walikota berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi tersebut harus disampaikan dua kali dalam satu tahun anggaran. Pelaporan pelaksanaan Dana Desa di Desa Jatimulyo dilaksanakan per semester, sehingga dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu pertengahan tahun dan akhir tahun anggaran. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati dan BPK. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 pasal 38 menyatakan bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan wawancara tentang pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo telah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Selain dari pernyataan dalam wawancara tersebut, bentuk pertanggungjawaban dapat dilihat dalam laporan realisasi APBDes

**Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang dimungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Menurut Andrianto (2007), Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasinya yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa Jatimulyo telah sesuai dengan indikator peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Hasil wawancara pengelolaan dana desa di Desa Jatimulyo untuk kegiatan kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut terdapat di papan baliho tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui papan baliho yang tersedia di Desa Jatimulyo serta dipublikasikan dalam web desa.

Selama menjalankan Pengelolaan Dana Desa, tidak terdapat kendala dalam hal transparansi kepada masyarakat. Pemerintah desa jatimulyo bersedia untuk menjelaskan kepada masyarakat jika ada hal yang ingin diketahui masyarakat mengenai pengelolaan dana desa

Dari segi transparansi, pemerintah Desa Jatimulyo selau berupaya untuk terbuka terhadap informasi yang masyarakat ingin ketahui mengenai pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Jatimulyo juga selalu mengajak masyarakat ikut serta dalam berbagai kegiatan musyawarah yang berkaitan dengan keuangan desa.

**Tabel Indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Indikator penilaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Jatimulyo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

**Tabel 4.5 Indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator yang harus dipenuhi | Ada | Tidak ada |
| Akuntabilitas : | √ |  |
| Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. | √ |  |
| Bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas secara tertib | √ |  |
| Bendahara melakukan pembukuan terhadap pemasukan dan pengeluaran kas | √ |  |
| Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan kepada bupati/walikota berupa laporan realisasi APBDesa | √ |  |
| Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. | √ |  |
| Transparansi: |  |  |
| Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat | √ |  |
| Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat | √ |  |
| Menyediakan media informasi untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. | √ |  |

Sumber : Diolah sendiri oleh penulis pada tahun 2019

**KESIMPULAN**

Hasil analisis dari segi akuntabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa jatimulyo Telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 sehingga desa jatimulyo dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel. Dari segi transparansi untuk desa Jatimulyo sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 113 tahun 2014, yaitu adanya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, serta adanya informasi tertulis mengenai dana yang didapat dari pemerintah daerah dan realisasinya kepada masyarakat serta camat dan bupati, sehingga pengelolaan dana desa di Desa Jatimulyo dapat dikatakan transparan.

Pemerintah Desa Jatimulyo diharapkan dapat Menambah pemasangan baliho mengenai laporan realisasi APBDes ke setiap dusun yang ada di Desa Jatimulyo agar lebih mudah diakses masyarakat, Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi keuangan Desa yang dapat diakses melalui web serta Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk lebih kritis lagi dalam mengawal kegiatan pembangunan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*.Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Damayanti, Wienda. 2018 . *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Studi Kasus Pada Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri).* Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dwiyanto, Agus. 2006. “*Transparansi Pelayanan Publik*”, dalam Agus Dwiyanto,ed . 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Imam, S Tunggal dan Amin W Tunggal. 2002.*Membangun Konsep Corporate Governance*. Havarindo : Jakarta..

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta*: Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Meutia, Inten & Liliana. 2017. “*Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* 8(2), 227-429. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>

Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriftif Kualitatif.Jakarta* : GP Press Group

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. 2008. “Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia.” *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*: 1–15.

Sarundajang, SH. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sedarmayanti. 2004. *Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Sudjana.2005. *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung: Tarsito

Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*.Yogyakarta: Gava Media